

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP MAKANAN YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN KEAMANAN PANGAN**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)

**TESIS**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum  
Universitas Andalas**



**Disusun Oleh:**

**NAMA : BETA PANDU YULITA, S.H**

**NIM : 1820112011**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M**
- 2. Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2021**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP MAKANAN YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN KEAMANAN PANGAN**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)

(Beta Pandu Yulita, 1820112011, Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Andalas, 108 Halaman, 2021)

**ABSTRAK**

Penegakan hukum merupakan usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. Upaya Penegakan hukum terdiri dari penegakan hukum represif dan preventif, penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dan penegakan hukum preventif yaitu pemberian informasi, petunjuk dan pengawasan. Berkaitan dengan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan (Studi Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PM Pdg) dirasa kurang tepat apabila dalam penegakan hanya fokus kepada penegakan hukum represif saja. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang. 2) Bagaimanakah koordinasi antara instansi terkait dalam penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang. 3) Apakah yang menjadi kendala dan bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian ini adalah: 1) Penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan di Kota Padang dilakukan dengan penegakan hukum represif, penegakan hukum represif telah berjalan dengan baik namun penegakan hukum preventif belum berjalan sebagaimana yang seharusnya. 2) Koordinasi antar instansi terkait dalam penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual KMSB sate yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang ini belum berjalan dengan baik atau belum sesuai dengan yang diharapkan. 3) Kendala dalam penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, kurang jalannya koordinasi instansi terkait, kurang memadai sarana dan prasarana. Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak halal di Kota Padang yaitu melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada pelaku usaha dan konsumen, melakukan pendataan usaha terhadap pelaku usaha.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum - Perlindungan Konsumen – Keamanan Pangan**

**LAW ENFORCEMENT IN CONSUMER PROTECTION AGAINST FOOD  
INCOMPATIBLE WITH FOOD SAFETY**

*(Study of Padang District Court Decision No. 429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)*

*(Beta Pandu Yulita, 1820112011, Andalas University Master of Law Study  
Program, 108 Pages, 2021)*

**ABSTRACT**

*Law enforcement is an effort to implement the law as it should, supervise its implementation so that there is no violation and if there is a violation, restore the law that has been violated so that it can be enforced again. Law enforcement efforts consist of repressive and preventive law enforcement, repressive law enforcement, namely all actions taken by law enforcement after a crime has occurred and preventive law enforcement, namely providing information, instructions and supervision. In relation to law enforcement in consumer protection for food that is not in accordance with food safety (Study Decision Number 429/Pid.Sus/2019/PM Pdg) it is deemed inappropriate if the enforcement only focuses on repressive law enforcement. The problems are: 1) How is law enforcement in consumer protection against KMSB satay sellers who are not in accordance with food safety? in Padang city. 2) How is the coordination between relevant agencies in law enforcement in consumer protection against KMSB satay sellers who are not in accordance with food safety in Indonesia? Padang city. 3) What are the obstacles and how are efforts to overcome the obstacles in carrying out law enforcement in consumer protection against KMSB satay sellers who are not in accordance with food safety in Indonesia? Padang city. The type of research used in this research is empirical juridical. The conclusions that the authors get from the results of this study are: 1) Law enforcement in consumer protection against KMSB satay sellers who are not in accordance with security in the city of Padang is carried out by repressive law enforcement, repressive law enforcement has been going well but preventive law enforcement has not run as expected should. 2) Coordination between relevant agencies in law enforcement in consumer protection against KMSB satay sellers who are not in accordance with food safety in the city of Padang has not gone well or has not been as expected. 3) Obstacles in law enforcement in consumer protection against KMSB satay sellers who are not in accordance with food safety in Padang City are limited human resources, lack of public awareness, lack of coordination of related agencies, inadequate facilities and infrastructure. Efforts to overcome obstacles in law enforcement in consumer protection against KMSB satay sellers who are not halal in Padang City are conducting socialization and supervision to business actors and consumers, conducting business data collection on business actors.*

**Keywords: Law Enforcement - Consumer Protection - Food Safety**